

.....
**EFEKTIVITAS HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
 TAHUN 2017-2019 DI KOTA BANDUNG**

Oleh

Muhamad Rafi Firdaus¹⁾, Husen Saeful Anwar²⁾, Ibnu Malik³⁾

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A.H. Nasution No.105 Bandung, Jawa Barat Indonesia

E-mail: [1muhamadrafifirdaus1@gmail.com](mailto:muhamadrafifirdaus1@gmail.com)

Abstract

This study describes how effective the results of regional wealth management are separated from the city of Bandung. Of the three targets for revenue sources from the management of regional wealth which are separated, there is only one post which is part of the original regional income, namely the share of profit on capital participation. The research method used by the researcher is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, document studies and audi visuals. The data analysis technique was carried out by data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The researchers conducted in-depth interviews using a purposeful sampling technique where the researchers conducted interviews with the Head of the Bandung City BPKA and Head of Sub. Bandung City BPKA Revenue Accounting. The results of the study indicate that the effectiveness of the results of regional wealth management which is separated from the city of Bandung has not yet been achieved.

Keywords: Effectiveness, Results of Separated Regional Wealth Management, Profit of BUMD

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang tersebar dengan berbagai suku dan budaya. Letak wilayah menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi dan pendapatan di masing-masing daerah mengalami perbedaan. Hal ini menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk dapat memanfaatkan segala aspek dalam upaya peningkatan terhadap penerimaan daerah (Suharyadi, 2018). Otonomi daerah telah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini berarti pelaksanaan otonomi daerah harus mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, sehingga daerah menjadi lebih mandiri dan lebih sejahtera (Funangi, 2018) Tujuannya antara lain lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bandung melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Rosidin, 2010)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah (Anggoro, 2017). Untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah perlu memperkirakan atau menghitung target/potensi, kemudian membandingkan antara target dan realisasi yang telah dicapai. Apabila ternyata terdapat perbedaan yang

sangat besar maka segera diteliti dari kelemahan yang ada. Beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab utama rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain: (1) Banyak sumber pendapatan di Kabupaten/Kota besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan bermotor, dan pajak bumi dan bangunan. (2) Badan Usaha Milik Negara (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah. (3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.

(4) Adanya kebocoran-kebocoran. (5) Biaya pungut yang masih tinggi. (6) Banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan. (7) Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Firdausy, 2017). Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup: (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN. (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Namun, Kota Bandung hanya mendapat dari satu sumber saja yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

Dalam hal ini laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk

mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititik beratkan kearah pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur (Apriani, 2017). Walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tetapi sifat utama dan perusahaan daerah bukan hanya berorientasi pada *profit* (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan kemanfaatan umum. Atau dengan kata lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjalin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan dikotomis yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan, hal ini dapat berjalan apabila profesioanlisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan (Putra, 2018).

- Sangat Efektif : >100%
- Efektif : 100%
- Cukup Efektif : 90%-99%
- Kurang Efektif : 75%-89%
- Tidak Efektif : ≤ 88%

Rumus efektivitas = Efektivitas : $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$ x 100%

Kota Bandung hanya mendapat penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari satu sumber, yakni Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mana seharusnya kota Bandung mendapat penerimaan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Negara dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik swasta . Realisasinya bahkan ternilai tidak efektif. Dilihat dari presentase penerimaan yang dibuktikan dengan teori (Mahmudi, 2015) di bawah ini:

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan Kota Bandung Tahun 2017-
2019

TA H U N	TARGE T	REALIS ASI	EFEKTI VITAS
20 17	RP 20.000.00 0.000,00	RP 11.279.07 2.122,00	56%
20 18	RP 66.902.85 4.788,00	RP 10.771.95 7.542,00	16%
20 19	RP 80.040.00 0.000,00	RP 10.477.35 0.536,00	13%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung

Dilihat dari tabel diatas bisa diketahui bahwa tingkat realisasi dari penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yakni Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat tidak efektif, setiap tahunnya selalu menurun dan tidak ada peningkatan. Sehingga perlu upaya dari Pemerintah Kota Bandung untuk mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan laba yang sebesar-besarnya dan kontribusi terhadap PAD akan semakin meningkat.

Selama ini BUMD ditengarai sebagai badan usaha yang selalu rugi dan membebani APBD. Alih-alih memberikan kontribusi untuk memperbesar PAD, tetapi yang terjadi justru lebih banyak bantuan atau hibah yang mengalir dari APBD dibandingkan bagian laba atau keuntungan dari BUMD yang disisihkan untuk PAD. (Siswadi, 2012)

Begitu pentingnya efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Bandung, dan menjadi tanggung jawab yang serius bagi Pemerintah Kota Bandung untuk mengelola dan mengembangkannya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi daerah ataupun masyarakat (Lazuardi, 2018).

Dari segi kriteria efektivitas menurut (Makmur, 2015) sebagai berikut :

1. Ketepatan Penentuan Waktu

Sebagaimana kita ketahui bahwasannya waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Untuk melaksanakan suatu kegiatan taau program maka perencanaan dalam penentuan waktu mutlak diperlukan. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Penentuan waktu disini dimaksudkan pada penyetoran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Bandung, dimana lebih ditekankan pada kapan waktu disetorkan serta sistematika pembayarannya dari setiap BUMD Kota Bandung kepada Pemerintah Kota Bandung seperti apa.

2. Ketepatan Perhitungan Biaya

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan.

Perhitungan biaya disini dimaksudkan dalam ketepatan pemanfaatan biaya, dimana BUMD Kota Bandung masih membebani APBD dalam Penyertaan modal, namun tidak diikuti dengan peningkatan kinerja yang ditandai dengan penerimaan atau hasil keuntungan yang sesuai target. Padahal tujuan dari penyertaan modal daerah ini untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja BUMD.

Tabel 2
Target dan Realisasi Nilai Investasi
(Penyertaan Modal) Daerah
Kota Bandung Tahun 2017-2019

Tahun	Target	Realisasi	Nilai Investasi
2017	RP 20.000.000,00	RP 11.279.072.122,00	123.623.000,00
2018	RP 66.902.854.788,00	RP 10.771.957.542,00	193.554.000,00
2019	RP 80.040.000,00	RP 10.477.350.536,00	72.772.760,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung

3. Ketepatan dalam Pengukuran

Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan adalah merupakan bagian dari keefektivitasan. Hampir semua kegiatan dimana pelaksanaannya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan

sebelumnya, dengan ketepatan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang telah menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

Maksud dalam pengukuran disini dilakukan sebagai ukuran keberhasilan yang ditetapkan sebelumnya. Pengukuran ini berupa target kinerja yang akan dicapai seperti target keberhasilan dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Bandung, dan ini terletak pada target penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana targetnya selalu tinggi bahkan naik di beberapa tahun. Tetapi hal tersebut tidak pernah terealisasi dengan baik.

4. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Organisasi apapun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman atau rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

Maksud dari menentukan tujuan ini ialah tujuan BUMD tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2014 pasal 331 diantaranya memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperoleh laba atau keuntungan. Pada prakteknya, BUMD di Kota Bandung yang menghasilkan laba dan keuntungan hanya 2 BUMD, dan kontribusinya dalam PAD pun selalu terbilang tidak efektif di setiap tahunnya.

5. Ketepatan Sasaran

Yaitu mengetahui sejauh mana ketepatan penentuan sasaran yang mempengaruhi tingkat keberhasilan program. Ketepatan sasaran lebih bersifat pada operasional dengan jangka waktu yang pendek. Apabila suatu organisasi telah menentukan sasaran dan terlaksana dengan tepat, maka hal itu dapat mempengaruhi tingkat suatu keberhasilan program yang telah ditentukan oleh organisasi tersebut. Jika tujuan yang ditetapkan tidak tepat, maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

Peneliti terdahulu yang penulis gunakan adalah penelitian dari (Funangi, 2018) yang berjudul “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua”, tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar tingkat efektifitas pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar kontribusi hasil efektifitas pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Yang menjadi keunikan atau perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian lain sebelumnya yaitu peneliti akan lebih dalam meneliti serta melihat dari fenomena dan masalah yang terjadi di lapangan dan penjabaran setiap dimensi, serta topik penelitian ini masih jarang diteliti yang menjadi alasan ketertarikan peneliti memilih topik ini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masih belum efektifnya realisasi dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Kota Bandung tahun 2017-2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan supaya hasil pengelolaan kekayaan daerah Kota Bandung bisa meningkat kedepannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif merupakan proses menyelidiki suatu permasalahan didasarkan pada gambaran menyeluruh disajikan menggunakan kata-kata, pandangan informan, kemudian disusun dalam latar alamiah (Silalahi, 2012). Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, untuk jenis penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan alasan peneliti dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang sebenarnya, melalui pencarian sistematis, mengumpulkan data dan menyeleksi kembali untuk melengkapi data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian untuk mendukung pencarian data, sehingga peneliti dapat menentukan kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam ini merupakan jenis data kualitatif yang dihasilkan dari proses wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif berupa laporan dan Hasil. Berikut sumber data dalam penelitian ini adalah : (1). Sumber data primer Sumber primer ialah sumber data ketika peristiwa tersebut terjadi. Menurut (Sugiyono, 2013) sumber primer merupakan data yang langsung diberikan untuk peneliti. Sumber primer penelitian ini berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dan beberapa BUMD Kota Bandung. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan mendalam oleh peneliti dengan menggunakan teknik *sampling purposeful* dimana peneliti melakukan wawancara kepada Ketua Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Kepala Sub. Bidang Akuntansi Pendapatan BPKA Kota Bandung (2). Sumber data sekunder Data sekunder ialah data pendukung penelitian, diantaranya yaitu berbagai komentar, interpretasi, atau materi original. Sumber data sekunder penelitian ini yaitu internet dan literatur ilmiah seperti buku, skripsi, artikel, jurnal, serta undang-undang yang

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. (Silalahi, 2012)

Teknik Pengumpulan Data

Adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menurut (Creswell, 2016) yaitu: (1). Observasi, pada saat observasi peneliti mendapat gambaran mengenai kondisi di lapangan nah ada tahap observasi ini peneliti mengunjungi dan melakukan pengamatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. (2). Wawancara, wawancara dilaksanakan mendalam oleh peneliti dengan menggunakan teknik *sampling purposeful* dimana peneliti melakukan wawancara kepada 4 orang yang berkompeten di bidangnya yaitu:

Tabel 4
Daftar Informan

No.	Nama Informan (Inisial)	Jabatan
1	DS	Ketua BPKA Kota Bandung
2	WD	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Pendapatan BPKA Kota Bandung

Keterangan:

1. Informan Kunci : DS
2. Informan Utama : WD

(3). Dokumen Studi, dokumentasi merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang mana dengan studi dokumentasi peneliti dapat melihat serta menganalisis berbagai dokumen mengenai suatu subjek. Dalam sebuah dokumen di dalamnya terdapat fakta serta data. Data yang terdapat dalam sebuah dokumen diantaranya berupa surat, catatan, foto, laporan, dan lain-lain. (4). Audio visual, dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan audio-visual berupa perekam yang digunakan pada saat wawancara kepada informan. Hal tersebut bertujuan untuk memahami paparan yang telah dijelaskan oleh informan secara lebih rinci dan memungkinkan

tidak adanya yang terlewat mengenai informasi yang disampaikan oleh informan.

Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Langkah analisis tersebut antara lain (1) *Data Reduction* (Reduksi Data). Reduksi data yaitu merangkum atau memilih hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga peneliti mudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan dapat dicari bila diperlukan. (2) *Data Display* (Penyajian Data). Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan paparan singkat, bagan dan yang lainnya. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersifat narasi. (3) *Conclusiun Drawing/verification*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketetapan Penentuan Waktu

Salah satu hal yang paling berpengaruh terhadap efektivitas adalah ketepatan waktu. Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam penentuan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program dalam mencapai tujuan. Satu-satunya pos pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini adalah bagian laba atas penyertaan modal BUMD Kota Bandung. Hasil temuan yang ditemukan oleh peneliti di lapangan mengenai dimensi ketepatan penentuan waktu untuk penyeteroran hasil bagian laba atas penyertaan modal masih ditemukan BUMD yang tidak menyetorkan hasilnya tepat waktu bahkan ada yang tidak menyetorkan

sama sekali. Maka dari itu peneliti merasa ada hal yang harus dibenahi dari masalah tersebut, diantaranya memperbaiki komunikasi antar sektor serta membenahi sistematika dari penyeteroran hasil bagian laba atas penyertaan modal tiap BUMD.

Ketepatan Perhitungan Biaya

Dimensi ketepatan perhitungan biaya dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat efektivitas. Ketepatan perhitungan biaya disini adalah biaya pelaksanaan serta pemanfaatannya. Hasil temuan yang peneliti temukan di lapangan mengenai dimensi ketepatan perhitungan biaya ini Kota Bandung menerima penerimaan pembiayaan dari penyertaan modal BUMD hanya beberapa BUMD saja yang menyeterkan, serta adanya ketidakseimbangan antara penyertaan modal yang masuk ke BUMD dengan kegiatan operasional, dimana kegiatan operasional BUMD ini nilainya sangat besar sehingga beberapa BUMD belum bisa menyeterkan laba atau dividennya karena habis untuk kegiatan operasional.

Tabel 3
Penerimaan Pembiayaan dari Penyertaan Modal Daerah Kota Bandung Tahun 2017-2019

Tahun	BUMD	Target	Penerimaan Pembiayaan
2017	Bank BJB	8.664.565.950	10.324.000.534
	PD BPR	850.000.000	657.914.588
	KPK B	195.434.050	297.157.000
2018	Bank BJB	11.000.000.000	10.474.800.542
	KPK B	300.000.000	297.157.000
2019	Bank BJB	11.000.000.000	10.370.400.536
	KPK B	300.000.000	106.950.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung

Maka dari itu peneliti merasa harus ada upaya yang dilakukan untuk membenahi hal tersebut agar perhitungan biaya disini menjadi efektif seperti menekan biaya operasional dari tiap BUMD Kota Bandung agar kegiatan operasional yang dikeluarkan tidak lebih besar dengan modal yang disertakan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Ketepatan dalam Pengukuran

Kriteria selanjutnya yang menentukan efektif atau tidaknya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini adalah ketepatan dalam pengukuran. Maksud dari ketepatan pengukuran disini ialah pengukuran berupa target kinerja yang akan dicapai seperti target keberhasilan dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Bandung. Adanya kemungkinan kurang tepatnya sistem perencanaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan ini sangat mungkin terjadi. Dimensi ketepatan dalam pengukuran ini bisa diukur dengan melihat sejauh mana kesiapan perencanaan yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam menanggapi suatu fenomena dan ketepatan menentukan realisasi penerimaan yang dapat dijadikan suatu target. (1). Pengukuran Perencanaan. Pengukuran perencanaan yaitu untuk mengetahui sudah tepat atau tidaknya perencanaan dalam penerimaan deviden dari tiap BUMD yang nantinya deviden tersebut akan dikelola sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan yang nantinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sebagai pengelola. (2). Pengukuran Realisasi. Pengukuran realisasi yaitu untuk mengetahui dapat dikatakan efektif atau tidaknya pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dengan melihat realisasi dari penerimaan deviden dari tiap BUMD yang menerima pembiayaan dan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Tujuan yang tepat atas dilakukannya pengelolaan kekayaan yang dipisahkan ini dapat mendukung tercapainya tujuan Kota

Bandung dalam mengoptimalkan dan mengelola hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus dikelola berdasarkan tertib, efisien, transparan, dan akuntabel dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Tujuan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah untuk mengoptimalkan perolehan laba atas penyertaan modal daerah. Pada dimensi ketepatan dalam menentukan tujuan ini dinilai sudah cukup baik, karena dari hasil wawancara dilapangan ditemukan tujuan dari diadakannya kekayaan yang dipisahkan ini bertujuan untuk memenuhi target di setiap tahunnya dan mencapai tujuan dari setiap BUMD yakni memberikan manfaat dan perkembangan ekonomi di daerah, ada pun kemanfaatan umum yang dituju ialah memperoleh laba agar dapat berkontribusi terhadap PAD yang ada, namun secara realisasi di lapangan masih dirasa kurang karena masih banyak BUMD yang tidak menyetorkan kewajibannya.

Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan hal penting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu program atau hal yang ingin dicapai. Program dapat dikatakan efektif apabila sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan aturan yang telah disepakati. Makmur (2011:7) menjelaskan bahwa sasaran yang tepat, baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan suatu keberhasilan. Apabila suatu organisasi telah menentukan sasaran dan terlaksana dengan tepat maka hal itu dapat mempengaruhi tingkat suatu keberhasilan program yang telah ditentukan oleh organisasi tersebut.

Dalam pelaksanaannya penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan setiap tahunnya selalu menurun bahkan bisa dibidang tidak efektif jauh dari target yang ditetapkan. Dari tiga sasaran pos sumber penerimaan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan ini hanya ada satu pos saja yang menjadi bagian atas pendapatan asli daerah yakni bagian laba atas penyertaan modal. Namun bisa dilihat bahwa kegiatan penyertaan modal yang Pemerintah Kota Bandung lakukan ini penerimaan kembalinya atau bagian laba atas penyertaan modalnya belum efektif atau belum tercapai. Bisa dilihat bahwa bagian laba atas penyertaan modal menjadi pos yang menyumbangkan pendapatan terkecil di pendapatan asli daerah Kota Bandung.

Dari hasil wawancara, pengamatan, dan analisis, peneliti menemukan beberapa hambatan mengapa kurang berkembangnya BUMD kota Bandung sehingga kurangnya menghasilkan laba yang nantinya untuk kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung, diantaranya: (1). Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan dengan temuan yang peneliti temukan di lapangan, peneliti menemukan promosi yang dilakukan oleh BUMD di Kota Bandung ini kurang menjangkau masyarakat sehingga membuat kurangnya pengetahuan masyarakat Kota Bandung terhadap perusahaan daerah di Kota Bandung. Ditambah lagi dengan adanya terobosan baru yang lebih mudah diketahui dari pada perusahaan daerah di Kota Bandung ini sendiri. BUMD di Kota Bandung ini tidak memanfaatkan platform yang lebih mudah diketahui masyarakat atau lebih mudah dijangkau, seperti social media. (2). Kurangnya daya minat masyarakat akan produk BUMD. Selaras dengan kurangnya informasi, masyarakat yang tidak tahu akan keberadaan BUMD ini pun menjadi enggan menggunakan jasa bahkan produk yang ditawarkan oleh BUMD, masyarakat juga lebih memilih barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Menimbang dengan perluasan informasi mengenai keunggulan produknya yang lebih meluas dan lebih diketahui masyarakat luas. Kemudian BUMD di Kota Bandung ini juga belum bisa bersaing produk dengan kompetitor di bidangnya. (3). Kurang strategisnya lokasi.

Kurang strategisnya lokasi ini menjadi penghambat juga optimalisasi penyertaan modal daerah. Seperti contohnya KPKB, dimana KPKB sendiri ini memiliki banyak unit usaha, salah satunya minimarket, namun lokasi yang diambil ini kurang strategis dan menjangkau masyarakat banyak, alhasil minimarket milih KPKB ini tidak diketahui banyak orang. Dan kebanyakan masyarakat lebih memilih berbelanja di minimarket terdekat dengan wilayah mereka, bahkan sekarang ada minimarket yang bisa secara online yang justru memudahkan masyarakat, dan minimarket milik KPKB ini belum memiliki hal itu. (4). Kurangnya modernisasi. Perusahaan Daerah di Kota Bandung ini kurang mengikuti perkembangan zaman, seperti belum memanfaatkan platform yang ada secara maksimal. Padahal masyarakat pada dewasa ini lebih memilih melihat informasi atau persebaran berita apapun via online, namun BUMD di Kota Bandung ini belum memaksimalkannya. Juga untuk barang atau jasa yang ditawarkan juga belum mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih minim kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota bandung, dimana dari tiga sasaran pos sumber penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini hanya ada satu pos saja yang menjadi bagian atas pendapatan asli daerah yakni bagian laba atas penyertaan modal. Pada penyetoran hasil bagian laba atas penyertaan modal masih ditemukan BUMD yang tidak menyetorkan hasilnya tepat waktu bahkan ada yang tidak menyetorkan sama sekali. Kemudian ketepatan perhitungan biaya ditemukan adanya ketidakseimbangan antara penyertaan modal yang masuk ke BUMD dengan kegiatan operasional, dimana kegiatan operasional BUMD ini nilainya sangat besar

sehingga beberapa BUMD belum bisa menyetorkan laba atau dividennya karena habis untuk kegiatan operasional. Serta kurangnya modernisasi BUMD dalam berapdatasi dan berlomba dalam menghasilkan laba yang nantinya disetorkan kembali menjadi PAD Kota Bandung. Sedangkan dalam ketepatan pengukuran dilakukan dua cara yaitu pengukuran perencanaan dan pengukuran realisasi, kedua hal itu dilakukan untuk mengetahui dapat dikatakan efektif atau tidaknya pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dengan melihat perencanaan dan realisasi dari penerimaan deviden dari tiap BUMD yang menerima pembiayaan dan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kota Bandung. Lalu untuk ketepatan dalam menentukan tujuan ini dilakukan untuk menyelelarkan tujuan dari adanya BUMD itu sendiri yakni memberikan manfaat dan perkembangan ekonomi di daerah serta memberikan laba atau profit kepada Pemerintah Kota Bandung. Dan terakhir dalam ketepatan sasaran dilakukan supaya ketiga sasaran pos penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini aktif kembali tidak hanya bagian laba atas penyertaan modal BUMD saja, supaya bisa memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Bandung sebanyak-banyaknya.

Rekomendasi

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah peneliti jabarkan, penulis ingin menyampaikan saran terhadap instansi terkait, yakni diantaranya:

1. Melakukan perbaikan perhitungan biaya serta penggunaan modal, hal ini dengan pertimbangan bahwa beberapa BUMD di Kota Bandung ini mengalami kerugian bahkan penyertaan modal yang habis untuk kegiatan operasional. Dengan begitu, maka akan meningkatkan juga bagian laba atas penyertaan modal.
2. Melakukan modernisasi. Modernisasi ini bisa dilakukan dalam hal pemaksimalan penggunaan teknologi, pembaharuan

pembahasan mengenai prioritas investasi nasional, juga memberikan pelayanan secara online, dengan begitu juga sama saja dengan memberikan lokasi BUMD secara strategis, mengingat dimasa modern seperti sekarang, masyarakat lebih menyukai diberikan pelayanan secara online.

3. Mengupayakan peningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandung untuk meningkatkan kemampuan finansialnya dalam membiayai penyertaan modal di Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: PUSTAKA SETIA.
- [2] Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- [3] Apriani, W. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Serta Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salahtiga Tahun Anggaran 2012-2016. *Jurnal Ekonomi*.
- [4] Creswell. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [5] Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [6] Funangi, U. (2018). Analiss Efektifitas dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*.
- [7] Kireina, N. Y. (2021). Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 32-37.
- [8] Lazuardi. (2018). Analisis Kontribusi Retribusi Daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*.
- [9] Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [10] Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Jakart: PT Revika Aditama.
- [11] Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- [12] Rosidin, U. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Dilengkapi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Perubahan-Perubahannya)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [13] Sekaran, U. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- [14] Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- [15] Siswadi, E. (2012). *Reengineering BUMD Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan yang Unggul*. Bandung: Mutiara Press.
- [16] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- [17] Suharyadi, D. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Moneter*.